**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan RPJMN ke-3 (ketiga) sebagai kelanjutan dari RPJMN sebelumnya dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke-2, RPJMN 2015-2019 ditujukan untuk *“memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat”.*

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan sebagaimana RPJPN 2005-2025, telah ditetapkan 9 (sembilan) Bidang yang menjadi fokus pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yaitu:

(1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

(2) Ekonomi.

(3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek),

(4) Politik.

(5) Pertahanan dan Keamanan.

(6) Hukum dan Aparatur.

(7) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang.

(8) Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta

(9) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi*“*TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah telah menetapkan Misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas telah dirumuskan 9 (sembilan) Agenda Prioritas atau Nawa Cita,yaitu:

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindung segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Sesuai tugas dan fungsinya, Dirjen Kementian Desai bagian dari Kementerian yang memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

 Dalam RPJMD Jawa Tengah 2013 – 2018 termuat visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran Pembangunan Jawa Tengah 2013 – 2018. Visi Provinsi Jawa Tengah adalah JAWA TENGAH BERDIKARI. Dalam visi ini tergambar bahwa Jawa Tengah pada hakekatnya merupakan peneguhan diri dan tekad untuk mewujudkan Jawa Tengah yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Jangkar ideologi tersebut pada mulanya digagas Bung Karno dikenal sebagai ajaran Tri Sakti.

Dalam rangka menuju JAWA TENGAH BERDIKARI tersebut maka prinsip Mboten Korupsi Mboten Ngapusi merupakan sikap dasar, kemauan dan perilaku yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan.

 Ada 4 misi Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
2. Memastikan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan dalam pelayanan publik;
4. Memperkokoh gotong royong, “guyub-rukun” serta “tepa slira” sebagai jati diri Jawa Tengah.

**III.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD**

 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak masa bhakti 2016-2021 telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis, Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”,***.

Untuk melaksanakan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersif, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

Berdasarkan misi tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga BerencanaKabupaten Demak mengemban  ***Misi ke 7 ( tujuh )*** Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk***,***

Sedangkan program unggulannya adalah :

* 1. Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan;
	2. Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera;
	3. Program peningkatan tata kelola dan sarana prasarana pasar tradisional;
	4. Program peningkatan daya saing komoditi unggulan pertanian, kelautan dan peternakan;
	5. Program Demak Smart City (Kota Pintar Berbasis IT);
	6. Program pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa menuju desa mandiri di bidang pembangunan fisik dan non fisik;
	7. Program percepatan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
	8. Program Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas dan berbasis standart;
	9. Program beasiswa Pasca Sarjana bagi 500 PNS dan tenaga kependidikan;
	10. Program Pembangunan RSUD baru di wilayah Demak bagian selatan;
	11. Program peningkatan jumlah dan kualitas dokter serta tenaga medis lainnya di seluruh Puskesmas;
	12. Program peningkatan kesejahteraan tenaga honorer dan guru Madin;
	13. Program pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap kecamatan;
	14. Program pemasangan CCTV di titik strategis dan penerapan IT untuk mempercepat pelayanan publik;
	15. Program peningkatan sarana prasarana pembinaan pemuda dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pramuka, olahraga, seni dan budaya;
	16. Program Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial;

Dinpermades P2KB Kabupaten Demak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara umum mengemban tugas sebagaimana tercantum dalam program ke 1 yaitu Program pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan , ke2 ( dua )Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera; , program ke 6 ( enam )Program penguatan pedesaan melalui desa mandiri dan sejahtera; dan program ke 16 ( enam belas ) yaitu Program Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial;

Sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Keluarga berencana, Dinpermades P2KB Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pemabngunan dan upaya pengendalian penduduk.

Berdasarkan analisis lingkungan dan dengan mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan, tujuan yang harus diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

* + 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat,perlindungan perempuan dan anak

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perekonomian pedesaan.

Indikatornya

* Tingkat partisipasi masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
* Perkembangan Bumdes
1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk

Sasaran : Terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Indikatornya

* Rata-rata jumlah anak dalam keluarga

**III.3. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran A.VII). Dinpermades P2KB Kabupaten Demak menempatkan program dan kegiatan urusan wajib bidang Pemberdayaan masyarakat dan keluarga Berencana dalam negeri sebagai berikut (terlampir dalam tabel 2).